POHON KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

TUJUAN

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Mempertahankan Stabilitas Sosial

SASARAN 1

Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Kualitas Demokrasi

INDIKATOR KINERJA

1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumsel
2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
3. Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)

SASARAN 1

Penguatan Ketentraman di Masyarakat

INDIKATOR

Persentase Kab/Kot Tanpa Konflik

SASARAN STRATEGIS 1

Peningkatan Ketertiban Organisasi Kemasyarakat

INDIKATOR KINERJA

Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif

SASARAN INTERMEDIETE 1

Penguatan Kapasitas dan Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Implementasi Program Pembangunan Daerah

INDIKATOR

Persentase Lembaga, Ormas dan Forum yang Aktif Bermitra dengan Pemerintah

SASARAN 1INTERMEDIETE 1

Meningkatnya Peran ORMAS dalam Pembangunan di Sumatera Selatan

INDIKATOR

Jumlah ORMAS yang berkinerja baik

SASARAN INTERMEDIETE 2

Meningkatnya ORMAS yang memiliki SKT

INDIKATOR

Jumlah ORMAS yang memiliki Legalitas

SASARAN STRATEGIS 2

Penguatan Kapasitas dan Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Implementasi Program Pembangunan di Daerah

INDIKATOR KINERJA

Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar

SASARAN INTERMEDIETE 1

Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat

INDIKATOR

Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan

SASARAN INTERMEDIETE 1

Pelestarian Seni dan Budaya Daerah yang Berwawasan Kebangsaan

INDIKATOR

Jumlah Pagelaran pelaku Seni dan Budaya Daerah

SASARAN INTERMEDIETE 2

Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama di Sumatera Selatan

INDIKATOR

Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang Aktif di 17 Kab/Kota

SASARAN STRATEGIS 3

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

INDIKATOR KINERJA

Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

SASARAN 1INTERMEDIETE 1

Peningkatan Rasa Cinta Tanah Air dalam Wadah NKRI

INDIKATOR

Jumlah kader bela negara di Sumatera Selatan

SASARAN INTERMEDIETE 2

Penguatan Ketentraman di Masyarakat

INDIKATOR

Kabupaten/Kota Zero Konflik

SASARAN INTERMEDIETE 3

Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan di Sumatera Selatan

Jumlah PPWK yang berperan aktif di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

SASARAN STRATEGIS 4

Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

INDIKATOR KINERJA

Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan

SASARAN INTERMEDIETE 1

Meningkatnya Kewaspadaan Dini Terhadap Potensi Konflik

INDIKATOR

Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan Pencegahan Dini Terhadap Potensi Konflik

SASARAN

Penurunan Potensi Konflik Sosial

INDIKATOR

Jumlah potensi Konflik yang ditangani

SASARAN

Penanganan Daerah Rawan Konflik

INDIKATOR

Jumlah penanganan daerah rawan Konflik

SASARAN 2

Meningkatnya Pendidikan Politik di Masyarakat

INDIKATOR

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam PEMILU/PEMILUKADA

SASARAN STRATEGIS 1

Peningkatan Pendidikan Politik di Masyarakat

INDIKATOR KINERJA

Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik

SASARAN INTERMEDIETE 1

Meningkatnya Pendidikan dan Pemahaman Politik Masyarakat

INDIKATOR

Jumlah Lembaga/ORMAS/Pelajar yang Mengikuti Pendidikan Politik

SASARAN INTERMEDIETE 2

Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik

INDIKATOR

Persentase fasilitasi kelembagaan parpol

SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam PEMILU/PEMILUKADA

INDIKATOR KINERJA

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam PEMILU/PEMILUKADA

SASARAN INTERMEDIETE 1

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PEMILU/PEMILUKADA di Sumatera Selatan

INDIKATOR

Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan PEMILU/PEMILUKADA

SASARAN INTERMEDIETE 2

Meningkatnya ORMAS Perempuan Dalam Berpolitik

INDIKATOR

Jumlah ORMAS Perempuan yang Aktif Dalam Berpolitik

M K n ::

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah